BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka, peneliti menyusun kesimpulan, sebagai berikut :

1. Perencanaan sumber daya aparatur dalam penerapan SIPKD di Dinas pendapatan dan Pengelolaan Daerah Kabupaten Bandung, telah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dengan adanya kegiatan perencanaan kurun waktu jangka panjang, kegiatan awal perencanaan adalah pengadaan sarana dan prasarana guna mendukung kerja pegawai serta kegiatan operasional khususnya dalam SIPKD, kegiatan yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya aparatur di bidang sistem informasi khususnya dalam penerapan SIPKD, ketiga adalah mengalokasikan dana untuk pengembangan aparatur dalam penerapan SIPKD.
2. Pengorganisasian sumber daya aparatur dalam penerapan SIPKD di Dinas pendapatan dan Pengelolaan Daerah Kabupaten Bandung berjalan secara baik hal ini bisa dilihat dari adanya struktur organisasi sesuai dengan gambar 3.3, aparatur yang bekerja sesuai dengan pengorganisasian. Hal ini menyebabkan pengorganisasian yang dibuat oleh dinas pendapatan dan pengelolaan daerah berjalan dengan baik.

3. Penstafan sumber daya aparatur dalam penerapan SIPKD di Dinas pendapatan dan Pengelolaan Daerah Kabupaten Bandung dalam hal ini pada Sub Bagian Keuangan sudah berjalan cukup baik, namun masih banyak permasalahan-permasalahan lain, seperti penempatan-penempatan aparatur yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan setiap aparatur sehingga menyulitkan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur dalam penerapan SIPKD.
4. Pengendalian manajemen sumber daya aparatur dalam penerapan SIPKD di Dinas pendapatan dan Pengelolaan Daerah Kabupaten Bandung sudah berjalan cukup baik. Pengendalian terhadap efektifitas dari SIPKD dalam memberikan informasi pengelolaan keuangn daerah ialah kepala Dinas yang membutuhkan informasi pengelolaan keuangn daerah yang ada di Kabupaten Bandung sekaligus pengguna fasilitas SIPKD. Disamping itu Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Daerah Kabupaten Bandung juga yang harus menilai, apakah pihak-pihak tertentu yang menggunakan fasilitas SIPKD sudah cukup puas dengan pelayanan yang telah diberikan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti merumuskan saran sebagai berikut:

1. Perencanaan yang harus dilakukan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Daerah Kabupaten Bandung dalam jangka waktu. Dengan meningkatkan

perencanaan kegiatan berupa pengadaan sarana dan prasarana, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya aparatur, mengalokasikan dana untuk pengembangan aparatur dalam penerapan SIPKD.

2. Penggorganisasian yang dibuat oleh dinas pendapatan dan pengelolaan daerah hendaklah berdasarkan struktur organisasi yang telah dibuat agar kinerja aparatur bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan pengorganisasian.
3. Penstafan yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Daerah Kabupaten Bandung, melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur dalam penerapan SIPKD dan menempatan setiap aparatur sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan setiap aparatur sehingga dapat berjalan dengan baik.
4. Pengendalian yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Daerah Kabupaten Bandung dalam penerapan SIPKD. Pengendalian dari Kepala Dinas sangat dibutuhkan agar pengamatan dan pemantauan terhadap sistem tersebut lebih ditingkatkan, sehingga dalam memberikan informasi pengelolaan keuangan daerah kepada kepala Dinas dapat menjadi tepat dan akurat. Dikarenakan pengendalian dilakukan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan atau ketidaksesuaian selama berlangsungnya pelaksanaan penerapan SIPKD.